



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2022

DINAS PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah rahmat, hidayah dan KaruniaNya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan disusunnya LKjIP Tahun 2022, diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Substansi LKjIP ini adalah untuk menginformasikan capaian kinerja. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2022, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022, sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya kami berharap agar LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat menjadi media

pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, 13 Februari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Isu Strategis	2
1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	3
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	12
1.5 Sistematika Penulisan	18
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	21
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	24
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	28
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	35
3.2 Realisasi Anggaran	58
3.3 Inovasi	59
3.4 Penghargaan	62

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	65
4.2 Rekomendasi	66

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja Perubahan 2022

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Cascading Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4
Gambar 1.2	: Cascading Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4
Gambar 1.3	: Peta Proses Bisnis Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah	6
Gambar 1.4	: Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	6
Gambar 2.1	: Tampilan Layar “Jogo Konco”, “Diyanti”, “Apem Ketan”, dan “SIGA”	34
Gambar 3.1	: Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 ...	40
Gambar 3.2	: Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Pulau Jawa	44
Gambar 3.3	: Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 .	45
Gambar 3.4	: Jumlah Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jumlah Pegawai Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	12
Tabel 1.2	: Jumlah Pegawai Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2022	13
Tabel 1.3	: Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember Tahun 2022	13
Tabel 1.4	: Data Anggaran Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	16
Tabel 2.1	: Tujuan, Sasaran dan Target Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	22
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	24
Tabel 2.3	: Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah	26
Tabel 2.4	: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perempuan dan Anak Tahun 2022	29
Tabel 2.5	: Program dan Kegiatan Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	30
Tabel 3.1	: Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	35
Tabel 3.2	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	36
Tabel 3.3	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2022	47

Tabel 3.4	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD 2018-2023	39
Tabel 3.5	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2022	39
Tabel 3.6	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	41
Tabel 3.7	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2022	42
Tabel 3.8	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD 2018-2023	43
Tabel 3.9	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2022	43
Tabel 3.10	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	45
Tabel 3.11	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2022	46
Tabel 3.12	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD 2018-2023	46
Tabel 3.13	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2022	47
Tabel 3.14	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	48
Tabel 3.15	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2022	49
Tabel 3.16	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4	

	Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD 2018-2023	49
Tabel 3.17	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2022	50
Tabel 3.18	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	50
Tabel 3.19	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-5 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2022	51
Tabel 3.20	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-5 Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD 2018-2023	51
Tabel 3.21	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-5 Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2022	52
Tabel 3.22	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	53
Tabel 3.23	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2022	53
Tabel 3.24	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD 2018-2023	54
Tabel 3.25	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2022	54
Tabel 3.26	: Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2022	55
Tabel 3.27	: Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2022	56
Tabel 3.28	: Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Dinas	

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2022 58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seusai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan di Jawa Tengah antara lain pemberdayaan perempuan dalam segala bidang pembangunan, implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak secara komprehensif dan lintas sektor, Pembangunan kualitas dan pengendalian penduduk serta Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga yang sinergis dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, diperlukan laporan pengukuran sebagai upaya untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dan keberhasilannya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS (pengukuran kinerja pegawai mengacu pada pengukuran kinerja instansi).

Pada akhir pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2022, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diwajibkan menyusun LKjIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berfungsi diantaranya untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada tahun berikutnya.

1.2 Isu Strategis

Permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Permasalahan utama/isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi:

- 1) Belum adanya konsistensi dan motivasi perempuan untuk berwirausaha mandiri;
- 2) Masih rendahnya perspektif masyarakat terhadap hak perempuan dan anak sehingga menyebabkan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama pada jenis kasus kekerasan berbasis gender online;
- 3) Masih kurangnya kapasitas tenaga layanan di layanan terpadu untuk pendampingan korban di daerah;
- 4) Keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah karena kurangnya kapasitas kader politik perempuan serta stigma masyarakat terhadap kader politik perempuan;

- 5) Implementasi kebijakan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten/Kota masih belum optimal;
- 6) Belum optimalnya pengintegrasian sistem pendataan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lintas sektor.

Permasalahan utama/isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi:

- 1) Masih rendahnya Kabupaten/Kota yang menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar;
- 2) Belum optimalnya peran aktif kader kelompok UPPKA dalam mendukung kesejahteraan keluarga karena terbatasnya kapasitas dan ketrampilan dalam berwirausaha;
- 3) Belum optimalnya peran aktif kader Tribina Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia (BKB, BKR dan BKL) untuk mendukung ketahanan keluarga;
- 4) Belum optimalnya kesertaan KB pada masa pandemi;
- 5) Masih rendahnya kesertaan KB dengan metode MKJP;
- 6) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat ber-KB;
- 7) Masih belum optimalnya pendataan terkait Keluarga Berencana secara berjenjang dan tervalidasi.

1.3 MANDAT KINERJA, PETA PROSES BISNIS, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas

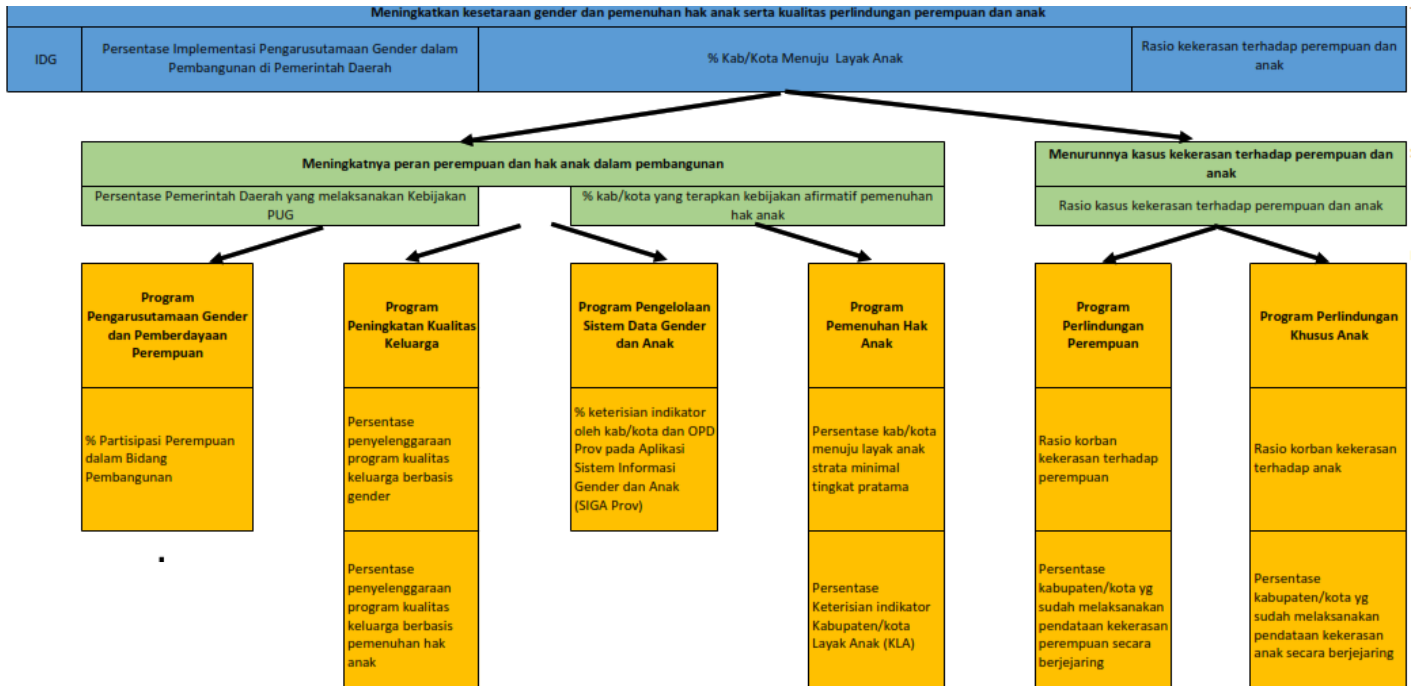
melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memiliki acuan untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar instansi dan / atau unit kerja di lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Tengah sesuai dengan visi misi dalam menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan yang digambarkan melalui Cascading dan Peta Proses Bisnis dibawah ini :

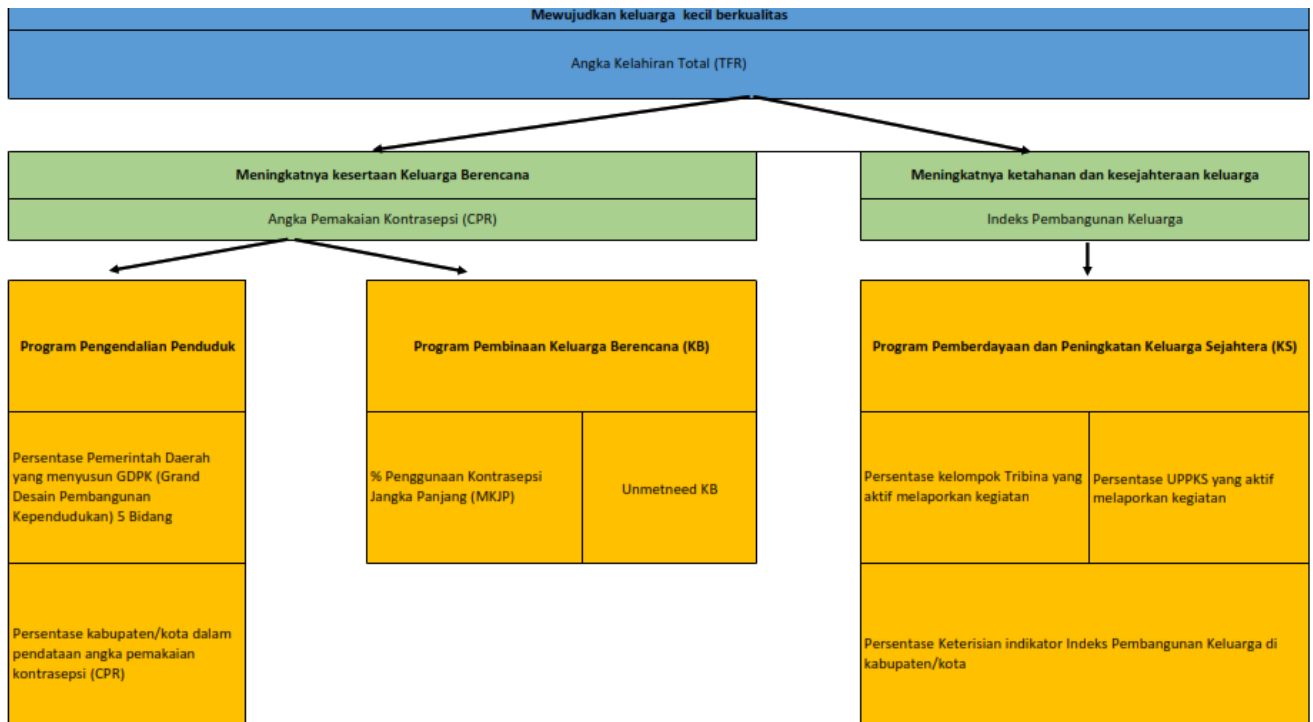
Gambar 1.1

CASCADING URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Gambar 1.2

CASCADING URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

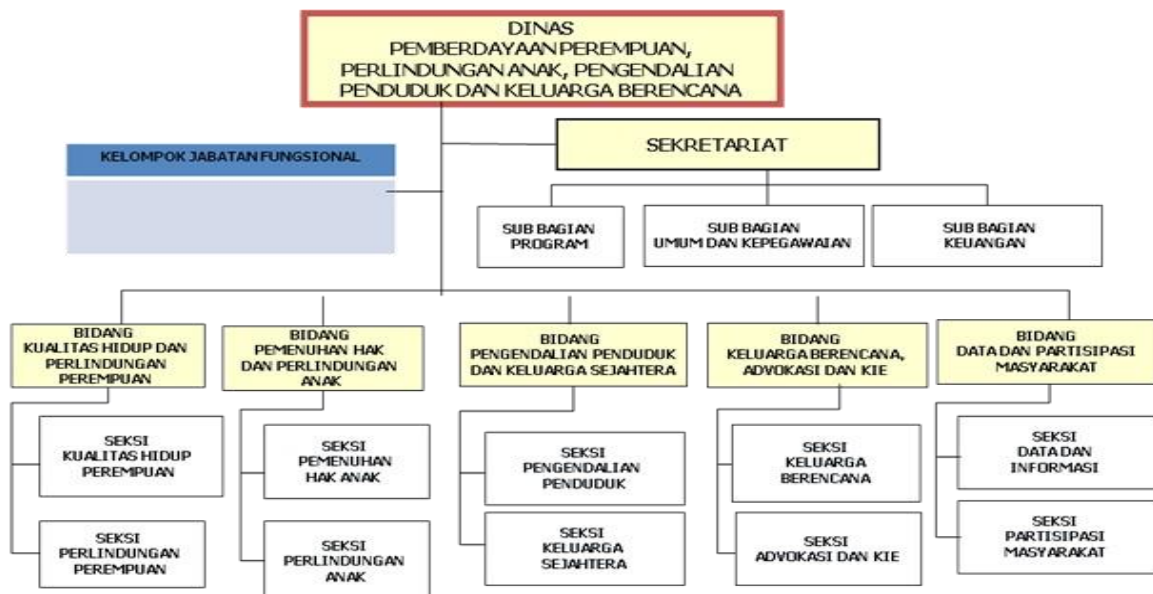


Gambar 1.3
Peta Proses Bisnis Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah



Sesuai dengan peta proses bisnis Dinas Perempuan dan Anak tersebut maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas dibagi kedalam beberapa unit kerja yang mendukung kinerja baik pada proses utama maupun proses pendukung Dinas.

Gambar 1.4
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah



Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dikuasakan kepada daerah.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas tiga (3) Subbagian : (a) Subbagian Program; (b) Subbagian Umum Kepegawaian; dan (c) Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas :

- a. Subbagian Program:
mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- b. Subbagian Umum Kepegawaian:
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- c. Subbagian Keuangan:
mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

2. Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan

Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di perlindungan perempuan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan terdiri dari dua seksi yakni : (a) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan (b) Seksi Perlindungan Perempuan, dengan uraian tugas :

- a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan:
Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan.

b. Seksi Perlindungan Perempuan:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan.

3. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak terdiri dari 2 (dua) seksi, yakni : (a) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan (b) Seksi Perlindungan Anak, dengan uraian tugas:

a. Seksi Pemenuhan Hak Anak:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan anak.

b. Seksi Perlindungan Anak:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga

sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluargasejahtera;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera terdiri dari dua seksi, yakni: (a) Seksi Pengendalian Penduduk dan (b) Seksi Keluarga Sejahtera dengan uraian tugas :

- a. Seksi Pengendalian Penduduk:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk.

- b. Seksi Keluarga Sejahtera:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera.

5. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, dan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluargaberencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terdiri dari dua seksi, yakni : (a) Seksi Keluarga Berencana dan (b) Seksi Advokasi dan Edukasi, dengan uraian tugas :

a. Seksi Keluarga Berencana

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana.

b. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi.

6. Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

Bidang Data Dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas Penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang data dan informasi, dan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari dua seksi, yakni: (a) Seksi Data dan Informasi dan (b) Seksi Partisipasi Masyarakat dengan uraian tugas :

a. Seksi Data dan Informasi

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi.

b. Seksi Partisipasi Masyarakat

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi masyarakat.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusianya dan perlengkapan yang dimilikinya sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Formasi pegawai sesuai beban tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah per 31 desember tahun 2022 sebanyak 110 orang, yang terdiri dari 61 orang PNS dan 49 tenaga non ASN.

Sedangkan Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS			Non PNS			Jumlah Total
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	SD	-	-	-	1	-	1	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	2	-	2	2
3	SMA Sederajat	3	-	3	20	3	23	26
4	D1	1	-	1	-	-	-	1
5	D3	-	4	4	-	-	-	4
6	DIV	-	2	2	-	2	2	4
7	S1	6	19	25	11	8	19	44
8	S2	3	23	26	1	1	2	28

No	Tingkat Pendidikan	PNS			Non PNS			Jumlah Total
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
9	S3	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		13	48	61	35	14	49	110

Kondisi tersebut telah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, namun perlu ditingkatkan kemampuan teknis. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	4	2	6
3	Golongan III	7	35	42
4	Golongan IV	1	12	13
Jumlah		12	49	61

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Per 31 Desember Tahun 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
I	Tanah	3	-	3
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	-	3
II	Peralatan dan Mesin	903	54	957
1	Alat-Alat Besar	11	-	11
	Pompa Air	6	-	6
	Generating set	1	-	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
	Gear Pump 20LMenit	1	-	1
	Panel Cos Genset	1	-	1
	Tangki Genset	1	-	1
	Genset Mobil	1	-	1
2	Alat-Alat Angkut	24	-	24
	Mobil	11	-	11
	Sepeda Motor	13	-	13
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	716	32	748
4	Alat Komputer	120	12	132
	Printer	43	1	46
	Scanner	2	1	3
	PC Unit	57	8	66
	Laptop	7	1	8
	Notebook	10	-	10
	Server	1	-	1
5	Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar Komunikasi	32	-	27
	Pesawat Telepon	18	-	23
	Telepon Central	1	-	1
	Instalasi PABX	1	-	1
	Power Mixer	3	-	3
	Faksimile	2	-	3
	Smartphone	-	-	1
	Switch	1	-	1
III	Bangunan dan Gedung	6	-	6
1	Bangunan Gedung Kantor	3	-	3
2	Bangunan Monumen (Baliho)	3	-	3
IV	Aset Tetap Lainnya	757	-	757
1	Buku dan Perpustakaan	753	-	753
2	Barang Bercorak Kebudayaan	4	-	4
	Jumlah Total	1.653	55	1.708

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan sarana dan prasarana perlengkapan kantor sudah memadai, terutama sarana prasarana komputer dimana sarana dan prasarana kerja, personal komputer untuk tiap pejabat struktural dan staf, akan tetapi sebagian personal komputer sudah memerlukan pembaharuan mengingat kapasitas beberapa personal komputer telah berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini sehingga perlu peningkatan dari sisi spesifikasi guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi.

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2022 memiliki Anggaran sebesar Rp 20.748.444.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.20.202.033.061,00 (97,37%) yang digunakan untuk 10 (Sepuluh) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
9. Program Keluarga Berencana (KB)
10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Berikut data anggaran Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.4

Tabel 1.4
Data Anggaran Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.748.444.000
1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.083.244.000
	Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	572.825.000
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.357.625.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	585.862.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.950.000
	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	58.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.077.344.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	396.138.000
2	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.221.868.000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politi, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	3.001.868.000
	Pelebagaan Pengarustamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Provinsi	220.000.000
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	977.246.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	100.000.000
	Penyediaan layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memelukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	351.522.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah	213.225.000
	Penguatan dan Pengembangan lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	312.499.000
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	175.000.000
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	50.000.000
	Penyediaan layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.634.132.000
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1.549.132.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan provinsi	85.000.000
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	752.053.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas	190.706.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	386.122.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas daerah Kabupaten/Kota	125.225.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	275.000.000
	Pemaduan dan Sinkronasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	225.000.000
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	50.000.000
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	340.000.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	150.000.000
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	150.000.000
	Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	40.000.000
9	PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)	1.139.901.000
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.093.011.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	46.890.000
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.000.000
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun dengan sistematis mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, struktur organisasi dan tata kerja organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*), landasan hukum dan sistematis penulisan LKjIP.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris, Kepala Bidang/Administrator sampai Kepala Seksi/Pengawas.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- 3) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
- 5) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 terdapat 4 (empat) saran/rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Memanfaatkan dokumen Renstra sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan yaitu agar target-target dalam RKT dan PK selaras dengan Renstra.	Mencermati kembali penyusunan RKT dan PK tahun berjalan agar selaras dengan target dan kinerja pada renstra maupun RKPD.
2.	Menyusun SOP monitoring Renstra yang memuat jadwal dan mekanisme yang jelas tentang monitoring Renstra secara periodik.	SOP monitoring Renstra OPD sudah disusun sebagai bahan evaluasi dan pengendalian target kinerja secara berkala.
3.	Pelaporan Kinerja agar menginformasikan tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan teknologi	Pelaporan kinerja sudah ditindaklanjuti dengan analisis efisiensi penggunaan SDM dan Teknologi.
4.	Informasi kinerja yang disajikan dalam LKJiP agar	LKJiP sebagai bahan perbaikan dokumen renja terutama pada penyesuaian aktivitas program dan

<p>digunakan untuk peningkatan kinerja kedepan, artinya terdapat bukti dukung yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan dokumen perencanaan (Renja).</p>	<p>kegiatan yang mempunyai ketercapaian indikator masih dibawah target maupun isu strategis yang harus diselesaikan melalui intervensi kegiatan/program.</p>
---	--

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, secara khusus mendukung pencapaian visi dan misi serta program kerja Gubernur Tahun 2018-2023. Visi Gubernur Jawa Tengah yaitu :

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, *Tetep Mboten Korupsi
Mboten Ngapusi*”

dan mendukung pencapaian Misi pada :

- Misi ke-3: “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran” dan
- Misi ke-4: “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”, secara umum memiliki fungsi strategis dalam percepatan pencapaian kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta keluarga kecil sejahtera.

Secara singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan;
2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana;
4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD yang digunakan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 sebagaimana terangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak		IDG (Index Pemberdayaan Gender)	75.10	74,03	75.12	75.14	72.60	71.64	72.70	72.70
			Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	60	82.86	82.86	85.71	100	91.43	100	100
			Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.51 per 100.000	8.44 per 100.000	8.37 Per 100.000	8.29 Per 100.000	8.22 Per 100.000	8.15 Per 100.000	8.07 Per 100.000	8.07 Per 100.000
			Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	34.27	34.30	34.30
		a. Meningkatkan peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	34.13	34,28	34.18	34.21	34.24	n/a	n/a	n/a
			Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	90	90
			Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	20	22.86	22.86	25.71	28.57	60	62.85	62.85

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	7.24 per 100.000	8.20 per 100.000	8.16 per 100.000	8.13 per 100.000	7.78 per 100.000	8.05 per 100.000	8.02 per 100.000	8.02 per 100.000
	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2.30	2.30	2.26	2.24	2.30	2.20	2.18	2.18
		a. Meningkatkan kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CP R	76.89	73.69	75.00	75.10	75.25	64.76	65.17	65.17
		b. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	22.14	n/a	21.64	21.14	21.14	n/a	n/a	n/a
			Indeks pembangunan keluarga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	54.38	56.29	56.29
	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	n/a	n/a	70	74	77	80	85	85
		a. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	n/a	n/a	70	74	77	80	85	85
		b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71.05	78.48	78.50	78,85	78.54	79,05	79,10	79,10

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 melaksanakan 3 tujuan dan 6 sasaran beserta indikator sasarannya, strategi dan kebijakan, sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD dengan efektif dan efisien.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	71,64
				Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	%	100
				Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,15
				Persentase Implementasi Pengarusutamaan	%	34,27

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
				Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah		
		1.1	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	%	80
				Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	60
		1.2	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,05
2.	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas			Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,20
		2.1	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Angka	64,76
		2.2	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan keluarga	Angka	54,38

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
3.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah			Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Angka	80
		3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	79,05
		3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan masyarakat	Angka	80

Dalam mencapai sasaran secara maksimal terdapat strategi dan arah kebijakan yang harus diwujudkan, yaitu:

Tabel 2.3
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas/ ketrampilan bagi perempuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Meningkatkan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha. 	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2. Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan dampak risiko 	Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak
3.	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemaduan kebijakan pengendalian penduduk; 2. Mengintegrasikan pendidikan kependudukan di SMA/SMK; 3. Meningkatkan kesertaan KB MKJP; 4. Meningkatkan penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB 	Peningkatan Pengendalian penduduk dan peningkatan kesertaan KB
4.	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui keterlibatan dan peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) dan peran PIK Remaja dalam mendukung ketahanan remaja; 2. Meningkatkan peran aktif dan penguatan kelompok UPPKA dalam mendukung kesejahteraan keluarga. 	Peningkatan keluarga sejahtera

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Peningkatan kualitas layanan publik perangkat daerah
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah serta di ikuti dengan Perjanjian Kinerja Eselon III (Administrator/Kepala Bidang) sampai eselon IV (kepala sub bagian) dan pejabat fungsional (sub koordinator).

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui 38 kegiatan serta 6 program, dimana kegiatan eks BAU (rutin) sebanyak 17 kegiatan dan eks BOP. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2022, secara lengkap tercantum pada tabel dibawah :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perempuan dan Anak
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan :			
1.	Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak	a. IDG (Index Pemberdayaan Gender)	71,64
		b. Presentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	100%
		c. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	8,15 per 100.000
		d. Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	34,27%
Sasaran :			
1.1	Meningkatnya Peran Perempuan dan Hak Anak dalam Pembangunan	a. Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	80%
		b. Presentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Afirmatif pemenuhan hak anak	60%
1.2	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,05 per 100.000
Tujuan :			
2	Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,2
Sasaran :			
2.1	Meningkatnya kesertaan keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	64,76
2.2	Meningkatnya ketahanan dan	Indeks pembangunan keluarga	54,38

	Kesejahteraan keluarga		
Tujuan :			
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80
Sasaran :			
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80
3.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,05

Adapun anggaran Program dan indikator kinerja yang menjadi bagian dari perjanjian kinerja pejabat administrator (Eselon III) dan Sub Koordinator/Sub Bagian (Eselon IV) sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah	a. Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah b. Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	90% 100%	Rp 12.083.244.000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	1 Dokumen	Rp 396.138.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 9.077.344.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp 58.000.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 17.950.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 585.862.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Rp 17.500.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Rp 1.357.625.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	Rp 572.825.000
2	Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6,42%	Rp 3.221.868.000
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi	40%	Rp 220.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial	30%	Rp 3.001.868.000
3	Program Perlindungan Perempuan	a. Rasio korban kekerasan terhadap perempuan b. Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring	5,70% 15%	Rp 977.246.000
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan	8,33%	Rp 213.225.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar	100%	Rp 351.522.000
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	a. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	8 Kelompok	Rp 100.000.000
		b. Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi	10 Kelompok	Rp 312.499.000
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	a. Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender b. Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak	35%	Rp 175.000.000
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender	40%	Rp 50.000.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	42,85%	Rp 125.000.000
5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	a. Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama b. Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	94,28% 20%	Rp 1.634.132.000
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	35 kab/kota	Rp 1.549.132.000
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	10 Kelompok	Rp 85.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Kewenangan Provinsi			
6	Program Perlindungan Khusus Anak	a. Rasio korban kekerasan terhadap anak b. Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejerang	12,46 per 100.000 15%	Rp 752.053.000
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak	8,33%	Rp 125.225.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	100%	Rp 386.122.000
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya b. Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi	15 kelompok 10 kelompok	Rp 190.706.000 Rp 50.000.000
7	Program Pengendalian Penduduk	a. Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang b. Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	19,44% 25%	Rp 275.000.000
	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK	7 kab/kota	Rp 225.000.000
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	7 dokumen	Rp 50.000.000
8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	a. Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan b. Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota	96,25 25%	Rp 340.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok tribina yang aktif	21.596 kelompok	Rp 150.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	a. Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif b. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.333 Kelompok 30%	Rp 150.000.000 Rp 40.000.000
9	Program Keluarga Berencana (Kb)	a. Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	29,50%	Rp 1.139.901.000

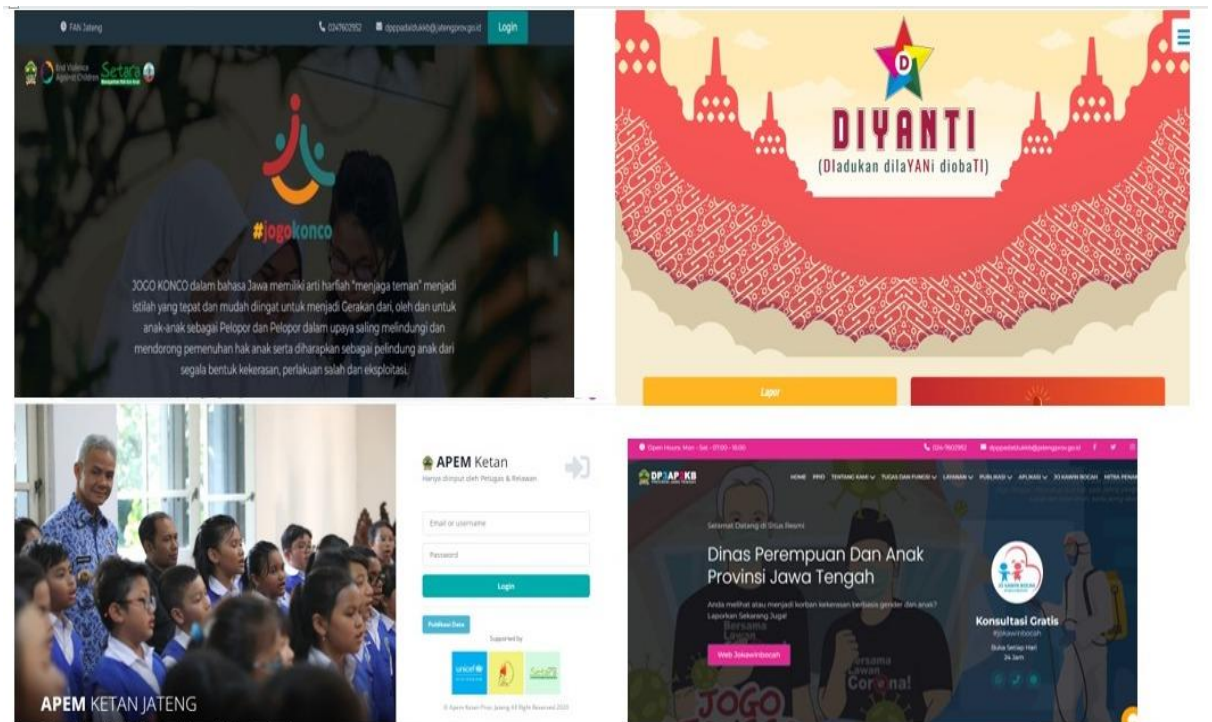
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		b. Unmeetneed KB	12,89%	
	Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta KB Aktif	4.282.778 orang	Rp 1.093.011.000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB	11,70%	Rp 46.890.000
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	a. Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	15%	Rp 150.000.000
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	5 kab/kota	Rp 150.000.000

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menggunakan aplikasi dari Sistem GRMS/SSO seperti e-planning, e-budgeting, e-RKO, e-penatausahaan, serta e-controlling yang wajib digunakan untuk membantu pekerjaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja SKPD. Selain itu, dalam mendukung kinerja, Dinas Perempuan dan Anak juga memiliki aplikasi yaitu sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA). Aplikasi ini mendorong adanya data pilah gender untuk menjadi pedoman dalam penentuan kebijakan terkait perempuan dan anak. Kemudian untuk mendukung pencegahan serta pengurangan risiko dan layanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak, terdapat aplikasi Diyanti (Diadukan, dilaYAni dan diobaTI), Jogo Konco, Apem Ketan serta Call Center Satuan Pelayanan Terpadu. Aplikasi tersebut menjadi mendorong terwujudnya pelayanan prima bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Gambar 2.1

Tampilan Layar “Jogo Konco”, “Diyanti”, “Apem Ketan”, dan “SIGA”



Beberapa tampilan layar inovasi yang ada di Dinas perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja, melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 100%;	Sangat Baik
2.	85 - 100%;	Baik
3.	65 – 84,99%;	Cukup
4.	50 – 64,99%;	Kurang
5.	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Untuk mengukur keberhasilan atas kinerja Dinas Perempuan dan Anak dapat dilihat diantaranya melalui realisasi indikator-indikator yang ada pada sasaran strategisnya, antara lain IPG, IDG, Rasio Kekerasan Perempuan Dan Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), *Total Fertility Rate* (TFR), CPR, *Unmeetneed*, Rasio Kekerasan Perempuan Dan Anak, UPPKA, Tribina (BKB,BKR dan BKL) Dan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk. Berikut adalah uraian capaian terkait urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perempuan dan Anak

Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dan Rencana Strategis Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, setidaknya terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, antara lain :

Penjabaran capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a) **Sasaran Strategis ke-1** : Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	34,27%	36,11%	105,37	Sangat Baik	Provinsi dan Kab/kota
		Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	91,43%	100%	109,37	Sangat Baik	Kemen PPPA
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,64%	71,64%*	100	Baik	BPS Prov. Jateng
1.a.	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	80%	80%	100	Baik	Provinsi dan Kab/kota
		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	60%	71,42%	119,03	Sangat Baik	Provinsi dan Kab/kota
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja					106,75%	Sangat Baik	

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Tahun 2022 Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan sebesar 106,75% atau kategori **Sangat Baik**.

Secara umum capaian pada Indikator sasaran Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan dilaksanakan dengan 2 indikator ,

yaitu indikator Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 80% dari target 80% dengan capaian 100% termasuk kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan, komitmen Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan PUG dalam segala sektor meningkat. Sedangkan indikator Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak tahun 2022 realisasi sebesar 71,42% dari target 60% dengan capaian 119,03% termasuk kategori **sangat baik**, dikarenakan adanya komitmen dan kesiapan kabupaten dan kota dalam menghadapi evaluasi Kota Layak Anak (KLA) meningkat, sehingga 10 Kabupaten/Kota mendapat predikat pratama, 17 Kabupaten/Kota mendapat predikat Madya, 7 Kabupaten/Kota mendapat predikat Nindya dan 1 Kota mendapat predikat Utama.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan adalah : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 3.221.868.000 terealisasi sebesar Rp. 3.154.592.514 (97,91%), efisiensi sebesar Rp. 67.275.486 (2,09%) dan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan anggaran sebesar Rp. 1.634.132.000 terealisasi sebesar Rp. 1.634.001.033, efisiensi sebesar Rp. 130.967 (0,01%).

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	34,27 %	36,11 %	105,37
		Persentase Kabupaten/Kot	85,71 %	91,43 %	106,67	100%	100%	100	91,43 %	100%	109,37

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		a Menuju Layak Anak									
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,14 %	71,73 %	95,46	72,6%	71,64 %	98,67	71,64 %	71,64 %	100
1a	Meningkatkan peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80%	80%	100
		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	25,71 %	54,28 %	211%	28,58 %	62,85 %	219,99 %	60%	71,42 %	119,03 %

Dalam capaian dari Tahun 2020 sampai 2022 terjadi peningkatan realisasi setiap tahunnya untuk indikator persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan afirmatif Pemenuhan Hak Anak. Sedangkan Peningkatan kualitas perempuan di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari indikator IDG dari tahun 2019 hingga tahun 2021, perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar 72,18%, kemudian mengalami penurunan menjadi 71,73 pada tahun 2020 dan terjadi penurunan lagi pada Tahun 2021 sebesar 71,64%. Hal tersebut terjadi karena penurunan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Sedangkan untuk tahun 2022, angka IDG belum publish dari BPS. Harapannya IDG Provinsi Jawa Tengah meningkat. Sedangkan beberapa indikator lain, baru dihitung realisasinya dari tahun 2022.

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD 2018-2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	36,11%	34,30%	105,28	Sangat Baik
		Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	100%	100%	100	Baik
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,64%	72,70%	98,54	Baik
1.a.	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	80%	90%	88,89	Baik
		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	71,42%	62,85%	113,64	Sangat Baik

Beberapa realisasi kinerja indikator sudah menunjukkan progress positif terhadap capaian target kinerja RPJMD Tahun 2023.

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

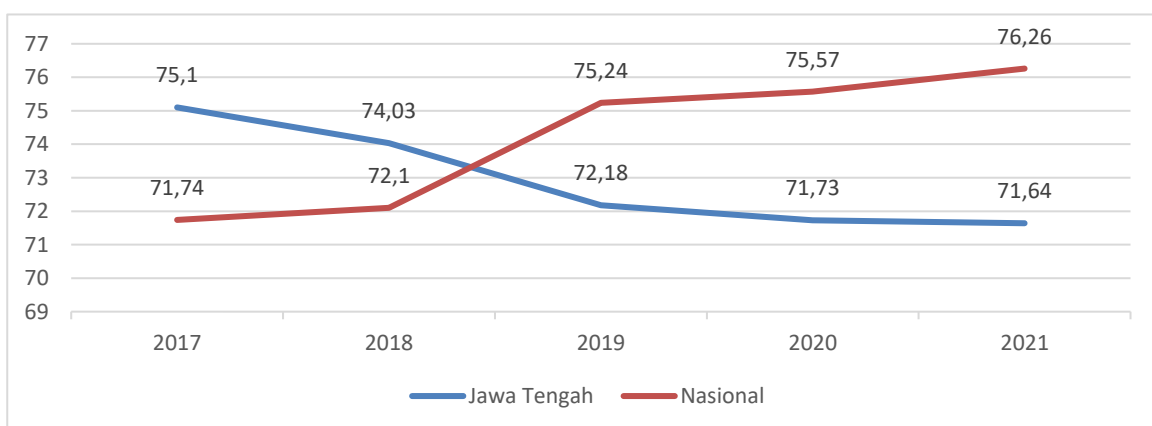
Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di	34,27%	36,11%	105,37	Adanya Perda Jateng nomor 2 Tahun 2022 tentang PUG	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
	serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	Pemerintah Daerah					
		Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	91,43%	100%	109,37	Pendampingan Implementasi KLA di Kab/Kota	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,64%	71,64%	100		
1.a.	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	80%	80%	100	Komitmen Kab/Kota untuk mengimplementasikan PUG di segala bidang semakin meningkat.	Advokasi Kab/Kota secara berkelanjutan
		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	71,42%	62,85%	113,64	Komitmen Kepala Daerah untuk mendorong terpenuhinya indikator KLA meningkat	Advokasi Kab/Kota secara berkelanjutan

Gambar 3.1

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021



*Sumber : BPS Tahun 2017-2021

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terus menurun. Penurunan terjadi karena salah satu pembentuk komposit pada

keterlibatan perempuan di parlemen terus menurun, Sehingga diperlukan afirmatif action untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen melalui peningkatan kader perempuan politik serta mendorong peningkatan wawasan perempuan terhadap Pendidikan politik.

- b) **Sasaran Strategis ke-2** : Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,15 per 100.000	8,10 per 100.000	100,62	Sangat Baik	Aplikasi Simfoni PPA, Tahun 2022
1.a	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,05 per 100.000	7,47 per 100.000	107,36	Sangat Baik	Aplikasi Simfoni PPA, Tahun 2022
<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja</i>					107,36%	Sangat Baik	

Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 104,14 % atau kategori Sangat Baik.

Pada indikator rasio kasus kekerasan perempuan dan anak, target 8,05 dengan realisasi 7,47% dengan capaian 107,36%, dengan kategori **sangat baik**. Masih tingginya jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2021 disebabkan dampak dari pandemi *Covid19* yang berpengaruh meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan yang berimbas pada meningkatnya kasus kekerasan perempuan dan anak. Pada saat ini, kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak juga meningkat.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak. Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran

Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar Rp. 1.366.800.000 terealisasi sebesar Rp. 1.223.274.916 (89,49%) yang artinya terjadi efisiensi sebesar Rp. 143.525.084 (10,51%). Hal ini terjadi karena pada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dari APBN tidak terserap optimal. Penyebabnya adalah kebutuhan anggaran menyesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan korban yang melapor serta sudah adanya Kerjasama dengan rumah sakit, sehingga biaya visum dan pendukungnya tidak dipungut biaya.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2022

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,29 per 100.000	8,99 per 100.000	92,21	8,22 per 100.000	8,97 per 100.000	91,63	8,15 per 100.000	8,10 per 100.000	100,62
1.a	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,13 per 100.000	8,49 per 100.000	95,76	7,78 per 100.000	8,35 per 100.000	93,17	8,05 per 100.000	7,47 per 100.000	107,36

Berdasarkan tabel di atas, terdapat penurunan Rasio Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak setiap tahunnya, namun yang masih menjadi perhatian khusus terhadap kekerasan perempuan dan anak karena masih tingginya kasus kekerasan terutama pada anak. Jenis kekerasan yang meningkat adalah kekerasan berbasis gender online.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2
Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD 2018-2023

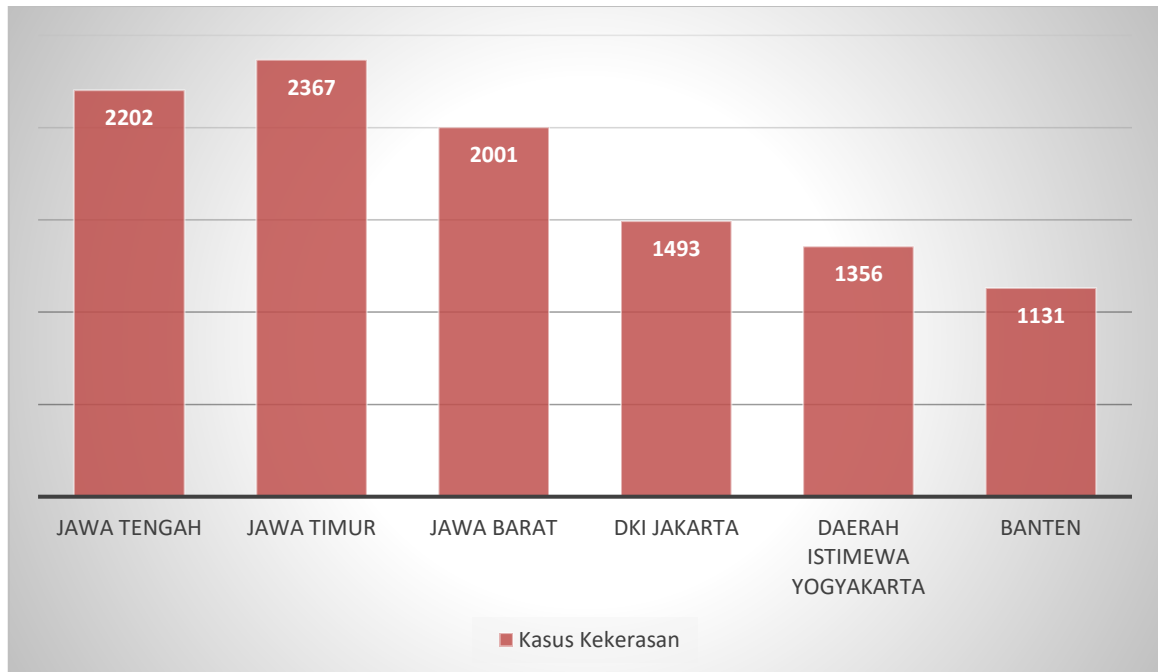
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,10 per 100.000	8,07 per 100.000	99,63	Baik
1.a	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	7,47 per 100.000	8,02 per 100.000	107,36	Sangat Baik

Beberapa realisasi kinerja indikator sudah menunjukkan progress positif terhadap capaian target kinerja RPJMD Tahun 2023

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2
Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,15 per 100.000	8,10 per 100.000	100,62	Meningkatnya kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan dan anak	Advokasi pencegahan Bersama mitra pentahelix dan masyarakat
1.a	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	7,47 per 100.000	8,02 per 100.000	107,36	Meningkatnya kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan dan anak	Advokasi pencegahan Bersama mitra pentahelix dan masyarakat

Gambar 3.2
Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Pulau Jawa
Tahun 2022

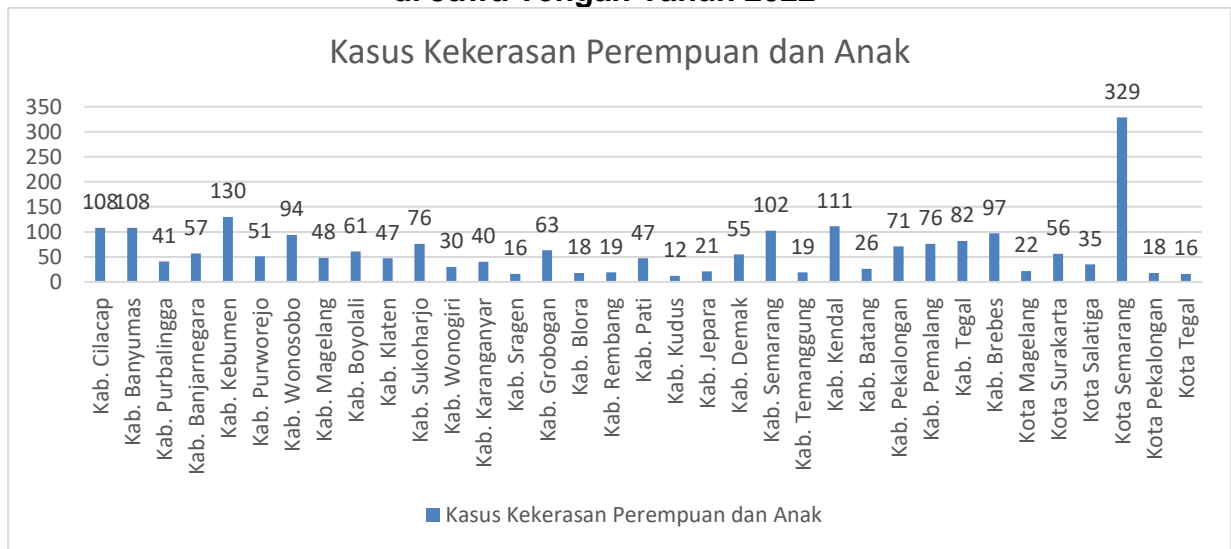


*Sumber data dari SIMPONI KPPA

Berdasarkan Gambar diatas, terlihat bahwa Angka kekerasan di Provinsi Jawa Tengah nomor 2 (dua) tertinggi Se Pulau Jawa, hal tersebut dikarenakan banyak kasus kekerasan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Sementara jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah terdapat di grafik bawah.

Gambar 3.3
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022



*Sumber data dari SIMPONI KPPA

c) **Sasaran Strategis ke-3** : Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,20	2,09	105,26	Sangat Baik	BKKBN Jawa Tengah, 2022
1.a	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	64,76	74,43	114,93	Sangat Baik	BKKBN Jawa Tengah, 2022
<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja</i>					114,93%	Sangat baik	

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana sebesar 114,93% atau kategori Sangat Baik.

Pada indikator angka pemakaian kontrasepsi/CPR telah terealisasi sebesar 64,76% dari target 74,43% dengan capaian 114,93% termasuk kategori Sangat Baik, dan sudah melebihi mencapai target akhir Renstra.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana adalah : Program Pengendalian Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang dialokasikan

dalam upaya pencapaian dengan indikator kinerja Angka pemakaian kontrasepsi/CPR sebesar Rp. 1.139.901.000 terealisasi sebesar Rp.1.139.532.000 (99,97%) atau terdapat efisiensi sebesar Rp 369.000 atau sebesar (0,03%).

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,24	2,23	100,44	2,3	2,09	110,04	2,2	2,09	105,56
1.a	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CP R	75,10	73,26	97,55	75,25	70,35	93,49	64,76	74,43	114,93

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR semakin menurun diakibatkan rendahnya peserta KB aktif dan dimasa pandemi pelayanan peserta KB tidak maksimal. Kemudian di Tahun 2022 Angka Pemakaian Kontrasepsi.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3
Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD 2018-2023

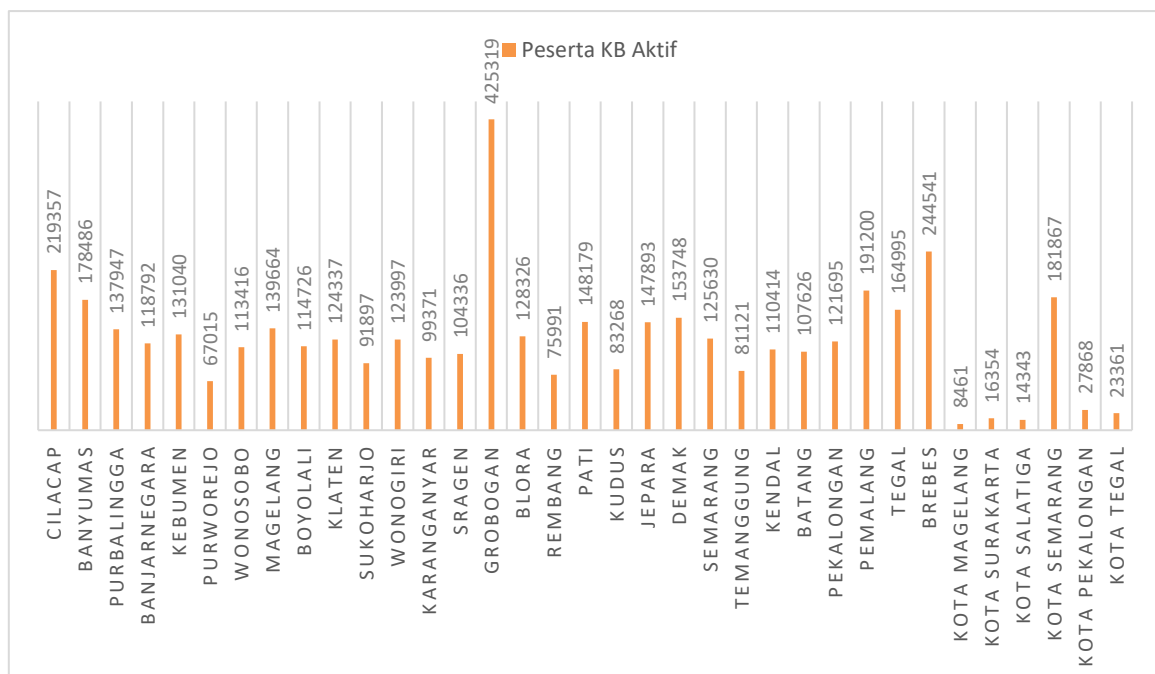
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,09	2,19	104,78	Sangat Baik
1. a	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	74,43	65,17	114,20	Sangat Baik

Beberapa realisasi kinerja indikator sudah menunjukkan progress positif terhadap capaian target kinerja RPJMD Tahun 2023.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3
Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	2,20	2,09	105,26	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang KB	Mendorong fungsi dan peran kader KB/PPKBD
1.	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	64,76	74,43	114,93	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat ber-KB, masih rendahnya rasio PLKB terhadap PUS	Meningkatkan advokasi tentang manfaat ber-KB kepada masyarakat, meningkatkan fungsi dan peran PPKBD untuk mendukung PLKB

Gambar 3.4
Jumlah Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



*Sumber dari BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

d) **Sasaran Strategis ke-4** : Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga,

dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	2,20	2,09	105,26	Sangat Baik	BKKBN. 2022
1.a	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan keluarga	54,38	56,10	103,16	Sangat Baik	BKKBN, 2022
<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja</i>					103,16%	Sangat Baik	

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar 103,16% atau kategori Sangat Baik.

Pada indikator sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga yaitu Indeks Pembangunan Keluarga pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 56,10 dari target 54,38 dengan capaian 103,16% termasuk kategori Sangat Baik. Kebijakan GDPK Provinsi Jawa Tengah sudah ada dengan terbitnya Pergub Jawa Tengah nomor 4 tahun 2023 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Indeks Pembangunan Keluarga pada tahun 2021 sebesar 56,10 sedangkan realisasi tahun 2022 akan rilis dari BKKBN bulan April 2023.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan adalah: Program Peningkatan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebesar Rp. 300.000.000 terealisasi sebesar Rp. 296.885.458 (98,96%) atau terjadi efisiensi sebesar Rp. 3.114.542 atau 1,04%.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,24	2,23	100,44	2,3	2,09	110,04	2,2	2,09	105,56
1.a	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan keluarga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	54,38%	56,10%	103,16

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4
Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD 2018-2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,09	2,19	104,78	Sangat Baik
1.a	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan keluarga	56,10	56,29	99,66	Sangat Baik

Beberapa realisasi kinerja indikator sudah menunjukkan progress positif terhadap capaian target kinerja RPJMD Tahun 2023.

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4

Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	2,20	2,09	105,26	Masih rendahnya pemahaman masyarakat manfaat KB	Meningkatkan peran PPKBD
1.a	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan keluarga	54,38	56,10	103,16	Masih tingginya kasus kekerasan dalam keluarga	Advokasi pencegahan kekerasan Bersama unsur pentahelix

Sasaran Strategis ke-5 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	87,81	109,76	Sangat Baik	DP3AP2KB
1.a	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan masyarakat	80	87,81	109,76	Sangat Baik	DP3AP2KB
					<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja</i>	109,76	Sangat Baik

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah Nilai kepuasan masyarakat sebesar 109,76% atau kategori Sangat Baik.

Pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah pada tahun 2022 telah terealisasi sebesar 87,81 dari target 80 dengan capaian 109,76% termasuk kategori Sangat baik. Hal ini ditunjukkan ISO:9001 pada tahun 2020 untuk layanan Satuan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. Selain itu juga banyak layanan secara hotline ((care center) dan

konsultasi keluarga (puspaga)) secara gratis yang mudah dijangkau.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah adalah: Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah, Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah sebesar Rp. 11.687.106.000 terealisasi sebesar Rp. 11.365.302.232 (97,25%) atau terjadi efisiensi sebesar Rp. 321.803.768 atau persentase 2,75%.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2022

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	87,81	109,76
1.a	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan masyarakat	74	81,75	110,47	77	81,75	106,17	80	87,81	109,76

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5
Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD 2018-2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	87,81	85	103,31	Sangat Baik
1.a	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat	Nilai Kepuasan masyarakat	87,81	85	103,31	Sangat Baik

daerah						
--------	--	--	--	--	--	--

Beberapa realisasi kinerja indikator sudah menunjukkan progress positif terhadap capaian target kinerja RPJMD Tahun 2023.

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5
Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	87,81	109,76	Adanya instrument pendukung kinerja pelaporan kekerasan perempuan dan anak serta inovasi yang dikembangkan	
1.a	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan masyarakat	80	87,81	109,76	Adanya instrument pendukung kinerja pelaporan kekerasan perempuan dan anak inovasi yang dikembangkan	

e) **Sasaran Strategis ke-6** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	87,81	109,76	Sangat Baik	DP3AP2KB
1.a	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,05	86,99	110,04	Sangat Baik	DP3AP2KB
<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja</i>					110,04%	Sangat Baik	

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, sebesar 110,04% atau kategori Sangat Baik.

Pada Indikator sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yaitu Nilai Sakip perangkat daerah pada tahun 2022 telah terealisasi sebesar 86,99 dari target 79,05 dengan capaian 110,04% termasuk kategori sangat baik.

Tabel 3.23

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2022**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	87,81	109,76
1.a	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,52	84,60	107,74	78,54	87,50	111,41	79,05	86,99	110,04

Tabel 3.24

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6

Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD 2018-2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	87,81	85	103,31	Sangat Baik
1.a	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,99	79,10	109,97	Sangat Baik

Beberapa realisasi kinerja indikator sudah menunjukkan progress positif terhadap capaian target kinerja RPJMD Tahun 2023.

Tabel 3.25

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6

Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	87,81	109,76		
1.a	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,05	86,99	110,04	Menurunnya capaian nilai SAKIP	Menindaklanjuti rekomendasi untuk perbaikan SAKIP

Tabel 3.26

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2022

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	TUJUAN Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,64	71,64	100				
	Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	34,27%	36,11%	105,37				
	Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	91,43%	100%	109,37				
	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,15%	8,10%	100,62				
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,20	2,09	105,25				
	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	87,81	109,76				
2.	SASARAN Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	60%	71,42%	119,03	1.909.132.000	1.908.816.734	99,98	1,2 (Efisien)

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	80%	80%	100	3.271.868.000	3.204.592.512	97,94	1,02 (Efisien)
	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,05 per 100.000	7,47 per 100.000	107,76	1.729.299.000	1.583.585.884	91,57	1,17 (Efisiensi)
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	64,76%	65,18%	108,08	1.414.901.000	1.413.609.715	99,91	1,08 (Efisien)
	Indeks pembangunan keluarga	54,38	56,10	103,16	340.000.000	336.869.581	99,08	1,04 (Efisien)
	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	87,81	109,76	11.687.106.000	11.365.302.232	97,25	1,12 (Efisien)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,05	86,99	110,04	396.138.000	389.775.195	98,39	1,12 (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas, bahwa efisiensi yang sudah dilakukan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah pada indikator tujuan dan sasaran, telah secara efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran guna mencapai kinerja yang baik dan optimal pada tahun 2022.

Tabel 3.27
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya peran	Persentase pemerintah	100	Program Pengarusutamaan	Persentase peningkatan	100	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
	perempuan dan hak anak dalam pembangunan	daerah yang melaksanakan kebijakan PUG		Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi		
		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	119,03	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya	100	Menunjang
2.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	165,98	Program Perlindungan Perempuan	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	112,72	Menunjang
				Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio korban kekerasan terhadap anak	112,89	Menunjang
3.	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	108,08	Program Pengendalian Penduduk	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	170,23	Menunjang
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	102,69	Menunjang
4	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan keluarga	103,16	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok tribina yang aktif	133,76	Menunjang
					Persentase UPPKS yang aktif	165	Menunjang
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	109,76	Program Penunjangurusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	Menunjang
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	110,04				

3.2 REALISASI ANGGARAN

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2022, sumber dana dari APBD Murni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 18.960.297.000,00 terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 20.748.444.000,00 Anggaran tersebut terpilah dalam Anggaran untuk Belanja Operasi Rp. 18.810.797.000 dan Anggaran untuk Belanja Modal Rp. 149.500.000. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 adalah 97.37% terjadi efisiensi Rp. 546.410.939,00 (2,63%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.28
Penggunaan Anggaran Belanja Langsung
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2022

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.221.868.000	3.154.592.514	97,91
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	977.246.000	879.141.612	89,96
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	175.000.000	174.449.446	99,69
4.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.000.000	149.847.461	99,90
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.634.132.000	1.634.001.033	99,99
6.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	752.053.000	704.444.272	93,67
7.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	275.000.000	274.077.635	99,66
8.	PROGRAM PEMBINAAN	1.139.901.000	1.139.532.080	99,97

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	KELUARGA BERENCANA (KB)			
9.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	340.000.000	336.869.581	99.08
10.	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.083.244.000	11.755.077.427	97,28

Pada Program Perlindungan Perempuan, terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,04% karena adanya penggunaan dana alokasi khusus non fisik perlindungan perempuan dan anak yang penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan korban kekerasan, selain itu juga karena adanya Kerjasama dengan 7 rumah sakit untuk visum.

3.3 INOVASI

Dalam berjalannya Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menciptakan beberapa inovasi-inovasi untuk menunjang capaian kinerjanya, antara lain:

1. Jo Kawin Bocah



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menginisiasi *JO KAWIN BOCAH* sebagai gerakan bersama yang masif untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak di Jawa Tengah, karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengamatkan batas usia minimal menikah saat ini adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Program ini di antaranya bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan upaya

pencegahan perkawinan anak di Jateng. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pemenuhan hak dan perlindungan dalam mencegah perkawinan.

2. APEM KETAN



Aplikasi apemketan, menyajikan identifikasi data perempuan dan anak yang masuk kelompok rentan di Jawa Tengah. Aplikasi ini digunakan sebagai pedoman untuk pengambilan kebijakan untuk perempuan dan anak rentan. Selain itu juga sebagai dasar intervensi untuk pemberian bantuan yang terkait dengan perempuan dan anak kelompok rentan.

3. DIYANTI



Aplikasi ini digunakan sebagai layanan pengaduan bagi perempuan dan

anak yang menjadi korban kekerasan agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

4. SERAT KARTINI



Merupakan model pemberdayaan perempuan di akar rumput yang bertujuan mengembangkan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui peningkatan kesadaran dan pemikiran kritis, kecakapan hidup, solidaritas dan pembelajaran sepanjang hayat sehingga perempuan dapat menjadi pelopor perubahan sosial di lingkungan mereka, mampu memperjuangkan kesetaraan gender di keluarga, komunitas dan mendorongnya dalam kebijakan pemerintah tingkat bawah hingga tingkat atas

5. CETING KETAN



Inovasi Ceting Ketang (cegah stunting kelompok rentan) dilakukan untuk mendukung penurunan stunting melalui penggerakan pelayanan KB bagi kelompok rentan (Kelompok 4 Terlalu, Miskin, Pengangguran Gelandangan

Orang Terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa). Sehingga kedepannya, pengendalian kelahiran dari kelompok rentan ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan penduduk yang berkualitas.

3.4 PENGHARGAAN

Ada beberapa penghargaan yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2022, yaitu:

1. DP3AP2KB meraih nominasi Pemerintah Daerah Provinsi dalam komitmen terhadap perlindungan anak melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (21/7/2022).



2. Jawa Tengah sebagai Provinsi Layak Anak 2 Tahun berturut-turut oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI karena seluruh Kabupaten/Kota (35 Kabupaten/Kota) di Jawa Tengah mendapat predikat layak anak.



3. AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) menyelenggarakan penganugerahan AMSI Jateng Digital Award yang diberikan kepada 7 kategori sebagai bentuk apresiasi tertinggi penerapan digitalisasi dalam kinerja di sector Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, Perusahaan, BUMD, OPD, DPRD dan Pemda. DP3AP2KB Jateng termasuk dalam 5 nominasi kategori OPD.



4. DP3AP2KB meraih predikat “INFORMATIF” dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh KIP Jateng Tahun 2022.



5. DP3AP2KB meraih penghargaan sebagai Produsen Data Terbaik III dalam peningkatan ketersediaan metadata terkait pendataan kekerasan perempuan dan anak oleh BPS Provinsi Jawa Tengah.



BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keempat dari rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, hal itu dapat diukur dari seluruh target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dapat direalisasikan sesuai harapan dengan kategori **(Sangat Baik)**. Hal tersebut didukung data Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) rata-rata capaiannya sebesar (110,25%), dengan rincian sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan, didukung 2 indikator kinerja dengan capaian sebesar 109,52% atau kategori **Sangat Baik**;
- b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, didukung 1 indikator sebesar 165,98 % atau kategori **Sangat Baik**;
- c. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana, didukung 1 indikator didukung sebesar 108,08% atau kategori **Sangat Baik**;
- d. Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, didukung 1 indikator sebesar 103,16% atau kategori **Sangat Baik**;
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah Nilai kepuasan masyarakat, didukung 1 indikator sebesar 109,76% atau kategori **Sangat Baik**;
- f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, didukung 1 indikator sebesar 110.04% atau kategori **Sangat Baik**.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya

manusia, anggaran, sarana prasarana dan dukungan dari mitra kerja.

Beberapa inovasi baik instrument pendukung kinerja maupun inovasi program/kegiatan yang dikembangkan oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sudah mampu untuk menyelesaikan beberapa isu strategis yang ada terkait urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana walaupun belum secara optimal.

Permasalahan yang masih ada antara lain :

1. Pemberdayaan ekonomi perempuan yang sudah dilakukan, belum ditindaklanjuti secara optimal oleh OPD Kabupaten/Kota karena keterbatasan anggaran;
2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan berbasis gender online;
3. Masih rendahnya informasi manfaat ber-KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru menikah;
4. Masih rendahnya Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen GDPK dan mengintegrasikan kedalam dokumen perencanaan;
5. Masih tingginya angka stunting, yang salah satunya karena kurang aktifnya kader tribina;
6. Kurang optimalnya kader UPPKA untuk aktif mendorong kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi produktif.

4.2 Rekomendasi

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan secara berkelanjutan;
2. Mendorong pencegahan dan pelayanan dalam rangka menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara lintas sektor baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota;
3. Meningkatkan advokasi KIE KB sebagai upaya mendorong kesertaan KB;
4. Mendorong Kabupaten/Kota untuk membuat Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) dalam rangka mewujudkan tercapainya kualitas penduduk yang tinggi;
5. Meningkatkan kualitas Tribina (BKB, BKR, BKL) untuk mendorong pengurangan

angka stunting;

6. Meningkatkan kapasitas kader UPPKS sebagai upaya mendorong ekonomi keluarga.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja pada tahun kedepan.

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si. MM
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP
Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TENGAH

TTD
H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 00 1

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan :			
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak	a. IDG (Index Pemberdayaan Gender)	71,64
		b. Presentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	91,43%
		c. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	8,15 per 100.000
		d. Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	34,27%
Sasaran :			
1.1	Meningkatnya Peran Perempuan dan Hak Anak dalam Pembangunan	a. Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	80%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		b. Presentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Afirmatif pemenuhan hak anak	60%
1.2	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,05 per 100.000
Tujuan :			
2	Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,2
Sasaran :			
2.1	Meningkatnya kesertaan keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	64,76
2.2	Meningkatnya ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan keluarga	54,38
Tujuan :			
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80
Sasaran :			
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80
3.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,05

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	3.221.868.000	APBD
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp	977.246.000	APBD
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	175.000.000	APBD
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	150.000.000	APBD
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	1.634.132.000	APBD
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	752.053.000	APBD
7	Program Pengendalian penduduk	Rp	275.000.000	APBD
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	1.139.901.000	APBD
9	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	340.000.000	APBD
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	12.083.244.000	APBD

Semarang, 31 Oktober 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI JAWA TENGAH

TTD

H.GANJAR PRANOWO, SH, M.IP



Dra. RETNO SUDEWI Apt. M. SI. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 00 1